



ISBN : 979 474 233 3
31560.9526

50
PROKLAMASI
PENDAPATAN REGIONAL
JAKARTA BARAT
1993 - 1994

468

<https://jakbarkotab.go.id>
KARTAL

akarta

KANTOR STATISTIK *BPS* PROPINSI DKI JAKARTA



MILIK

PERPUSTAKAAN
BPS PROVINSI
DKI JAKARTA



ISBN : 979 474 233 3
31560.9526

NO. PUSTAKA : 10.1095.0019.
M F N : 246
MILIK : PERPUSTAKAAN BPS PROVINSI
DKI JAKARTA

50
PROKLAMASI
PENDAPATAN REGIONAL
JAKARTA BARAT
1993 - 1994



WILDA: 31.00

ARSIP

KANTOR STATISTIK *BPS* PROPINSI DKI JAKARTA

KATA PENGANTAR

Publikasi " Pendapatan Regional Kotamadya Jakarta Barat Tahun 1993-1994 " ini memuat hasil penghitungan pendapatan regional Kotamadya Jakarta Barat menurut lapangan usaha (sektor ekonomi) baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 1993.

Perlu diketahui, bahwa berbeda dengan seri publikasi sebelumnya yang menggunakan tahun dasar 1983, publikasi ini memuat hasil penghitungan PDRB dengan tahun dasar 1993. Oleh karena itu angka-angka yang disajikan untuk tahun 1994 masih merupakan angka sementara, sedangkan angka tahun 1993 sudah merupakan angka perbaikan.

Untuk memberikan gambaran lebih rinci mengenai laju pertumbuhan ekonomi yang telah dicapai, data pendapatan regional yang disajikan tidak hanya agregat saja, tetapi juga dalam bentuk angka indeks dan persentase. Harapan kami, publikasi ini dapat membantu menyediakan bahan masukan bagi perencanaan dan evaluasi hasil-hasil pembangunan di wilayah ini.

Kami menyadari bahwa hasil penghitungan pendapatan regional yang dilakukan ini masih banyak mengandung kelemahan dan kekurangan, tentu saja akan kami upayakan untuk memperbaiki dan menyempurnakannya di waktu mendatang.

Akhirnya, kami sampaikan penghargaan dan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan hingga terwujudnya publikasi ini.

Jakarta, Oktober 1995

**KEPALA KANTOR STATISTIK
PROPINSI DKI JAKARTA**



Abdul Kadir Hasibuan, M.Sc.

NIP. 340000764

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
I. KONSEP DAN DIFINISI	1
1.1. U m u m	1
1.2. Arti dan Kegunaan Statistik Pendapatan Regional	3
1.2.1. Arti dan Kegunaan	3
1.2.2. Siklus Kegiatan Ekonomi	4
1.2.3. Pengertian Pendapatan Regional	5
1.3. Metode Penghitungan Pendapatan Regional	7
1.4. Cara Penyajian dan Angka Indeks	8
1.5. Pendapatan Regional Atas Dasar Harga Konstan..	10
1.6. Masalah dan Keterbatasan	11
II. URAIAN SEKTORAL	13
2.1. Sektor Pertanian	13
2.1.1 Tanaman Bahan Makanan	13
2.1.2 Tanaman lainnya	14
2.1.3 Peternakan dan Hasil-hasilnya	14
2.1.4 Perikanan	15
2.2 Sektor Industri Pengolahan	15
2.3 Sektor Listrik, Gas dan Air minum	16
2.3.1 Listrik	17
2.3.2 Gas	17
2.3.3 Air minum	17
2.4 Sektor Bangunan	18
2.5 Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran	18
2.5.1 Perdagangan Besar dan Eceran	18
2.5.2 Hotel	19
2.5.3 Restoran	19
2.6 Sektor Angkutan dan Komunikasi	20
2.6.1 Pengangkutan	20
2.6.2 Komunikasi	22

2.7	Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	23
2.7.1	Bank	23
2.7.2	Lembaga Keuangan Tanpa Bank dan Jasa Penunjang Keuangan	23
2.7.3	Sewa Bangunan	24
2.7.4	Jasa Perusahaan	25
2.8	Sektor Jasa-Jasa	26
2.8.1	Pemerintahan Umum dan Pertahanan	26
2.8.2	Jasa-Jasa Swasta	27
III.	TINJAUAN EKONOMI KOTAMADYA JAKARTA BARAT	
	TAHUN 1993 - 1994	30
3.1.	Pendahuluan	30
3.2.	Pertumbuhan Ekonomi Kotamadya Jakarta Barat ..	31
3.3.	Perkembangan Ekonomi Sektoral dan Peranannya	33
3.4	Kontribusi Sektoral Terhadap PDRB Jakarta Barat	35
3.5.	Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Per kapita	37
3.6.	Peranan PDRB Kotamadya Jakarta Barat terhadap DKI Jakarta	38

DAFTAR TABEL

	Halaman
1. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, (Juta Rupiah)	41
2. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 1993 Menurut Lapangan Usaha, (Juta Rupiah)	42
3. Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha	43
4. Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 1993 Menurut Lapangan Usaha	44
5. Indeks Berantai Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha	45
6. Indeks Berantai Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 1993 Menurut Lapangan Usaha	46
7. Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha	47
8. Produk Domestik Regional Bruto Jakarta Barat dan Angka-angka Per Kapita	48

I. KONSEP DAN DEFINISI

1.1. U m u m

Pada hakekatnya yang dimaksud dengan pembangunan ekonomi adalah serangkaian usaha dan kebijaksanaan yang bertujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas kesempatan kerja, mengarahkan pembagian pendapatan masyarakat yang semakin merata, meningkatkan hubungan ekonomi regional, sehingga kegiatan ekonomi yang selama ini didominasi sektor primer bergeser ke sektor sekunder dan tersier. Dalam menyusun perencanaan pembangunan suatu wilayah memerlukan berbagai macam data statistik. Demikian pula dalam melakukan evaluasi terhadap hasil-hasil pembangunan. Salah satu tolok ukur yang biasanya dipakai dalam kegiatan tersebut adalah data statistik pendapatan regional.

Penghitungan Pendapatan Regional DKI Jakarta sudah dilakukan oleh Kantor Statistik sejak tahun 1969, sedangkan untuk tingkat Kotamadya sudah dihitung sejak tahun 1986. Berbeda dengan penghitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tahun-tahun sebelumnya, maka pada seri penghitungan PDRB tahun 1993 - 1994 telah digunakan tahun dasar baru, yaitu tahun 1993. Beberapa hal yang mendorong dilakukannya penggeseran tahun dasar dari penghitungan PDRB atas dasar harga konstan 1983 menjadi harga konstan 1993 adalah :

- a. Pertumbuhan ekonomi yang dihitung berdasarkan tahun dasar tahun 1983 menjadi makin tidak realistis karena perubahan struktur ekonomi yang relatif cepat mengakibatkan pertumbuhan ekonomi berdasarkan tahun dasar 1983 menjadi kerendahan.

- b. Struktur ekonomi tahun 1983 belum tersentuh dampak deregulasi dan debirokratisasi. Padahal dengan adanya kebijaksanaan-kebijaksanaan tersebut telah mendorong kearah pergeseran struktur perekonomian nasional yang pada gilirannya akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.
- c. Pergeseran tahun dasar PDRB merupakan sesuatu hal yang secara reguler dilakukan oleh semua negara di dunia yang menyusun penghitungan PDRB-nya berdasarkan "The System of National Accounts (SNA)" yang direkomendasikan oleh PBB untuk menjadi pegangan bagi semua negara anggota.

Selain ketiga alasan di atas secara tehnik Biro Pusat Statistik (BPS) berusaha mengikuti SNA yang baru, karena dengan memilih tahun 1993 merupakan tahun yang tepat dengan telah direkomendasikannya sistem yang baru tersebut.

Kemudian, Tahun 1993 juga merupakan kurun waktu sepuluh tahun dari tahun dasar sebelumnya, jadi intervalnya juga cocok dengan praktek yang dilakukan negara-negara lain.

Kondisi sosial ekonomi Indonesia pada tahun 1993 menunjukkan keadaan yang relatif stabil bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Selain itu, tahun 1993 adalah tahun terakhir pelaksanaan Pembangunan Jangka Panjang (PJP) I dan menjelang dimulainya PJP II. Karena itu tahun 1993 dapat dijadikan basis/tolok ukur perbandingan bagi perkembangan ekonomi dalam Repelita VI dan selanjutnya.

1.2. Arti dan Kegunaan Statistik Pendapatan Regional

1.2.1. Arti dan Kegunaan

Perencanaan ekonomi umumnya mempermasalahkan dua hal pokok, yaitu :

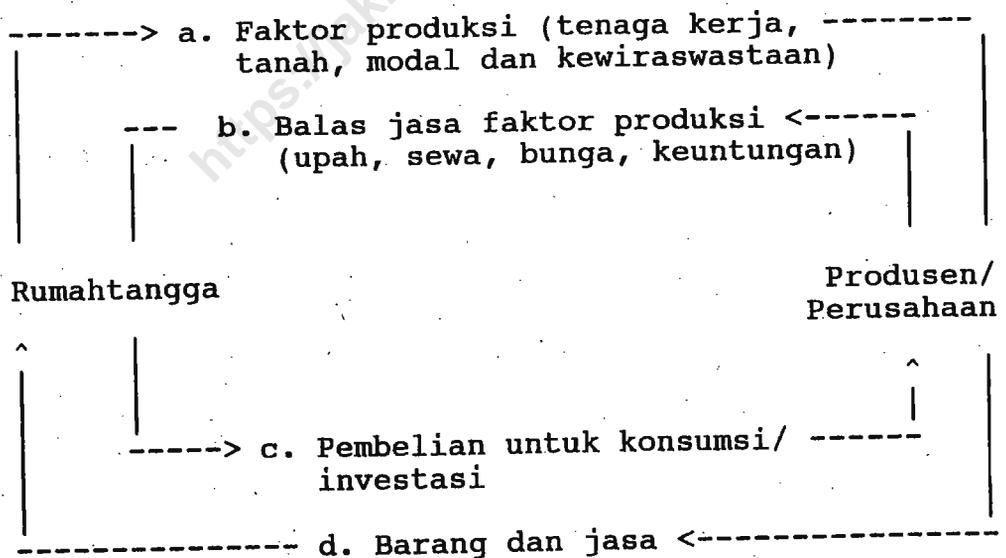
- a. Bagaimana mengusahakan agar pembangunan ekonomi dapat meningkatkan pendapatan masyarakat secara mantap.
- b. Bagaimana mengarahkan agar pendapatan yang timbul tersebut dapat diterima secara adil dan merata.

Untuk menjawab pertanyaan itu, secara kuantitatif statistik pendapatan regional dapat dipakai sebagai salah satu ukuran dan landasan yang tepat dalam perencanaan ekonomi tersebut. Statistik pendapatan regional adalah data kuantitatif yang menggambarkan besarnya barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu daerah (region) dalam periode waktu tertentu, biasanya satu tahun. Manfaat statistik pendapatan regional antara lain:

- a. Mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi regional baik secara menyeluruh maupun sektoral.
- b. Mengetahui gambaran struktur perekonomian suatu daerah.
- c. Mengetahui tingkat kemakmuran suatu daerah baik tingkat pertumbuhannya maupun tingkat kemakmurannya dibandingkan daerah lain.
- d. Mengetahui tingkat inflasi dan deflasi yang terjadi pada suatu daerah.
- e. Mengetahui potensi suatu daerah terhadap nasional baik keseluruhan maupun sektoral.

1.2.2. Siklus Kegiatan Ekonomi

Secara sederhana, transaksi ekonomi yang dilakukan oleh berbagai golongan masyarakat terdiri dari kelompok yang memproduksi barang dan jasa serta kelompok yang mengkonsumsi. Untuk menghasilkan barang dan jasa kelompok produsen memerlukan faktor produksi (tenaga kerja, tanah, modal, wiraswasta) yang berasal dari konsumen (rumah tangga). Pihak konsumen akan membeli barang dan jasa yang dihasilkan produsen untuk memenuhi kebutuhannya. Siklus tersebut sebagai berikut: Kelompok produsen dalam menghasilkan barang dan jasa menggunakan faktor produksi (tenaga kerja, tanah, modal, kewiraswastaan) yang berasal dari konsumen, sedangkan konsumen membeli barang dan jasa yang dihasilkan oleh produsen untuk memenuhi kebutuhannya. Transaksi siklus kegiatan tersebut adalah seperti berikut



1.2.3. Pengertian Pendapatan Regional

Sebelum sampai kepada pengertian sesungguhnya dari pendapatan regional, sebaiknya perlu dijelaskan secara rinci agregat-agregat dari pendapatan regional adalah sebagai berikut:

a. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Pasar

Adalah nilai bersih (produk) barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai kegiatan ekonomi di suatu daerah dalam satu periode tertentu. Nilai bersih tersebut sebenarnya adalah balas jasa dari faktor produksi yang ikut serta dalam produksi yang terdiri dari upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal, keuntungan serta ditambah dengan penyusutan dan pajak tidak langsung neto. Balas jasa faktor produksi, penyusutan dan pajak tidak langsung neto tersebut dalam pengertian sektoral disebut sebagai nilai tambah bruto, sehingga PDRB atas dasar harga pasar tersebut juga merupakan penjumlahan nilai tambah bruto dari sektor kegiatan ekonomi.

b. Produk Domestik Regional Neto (PDRN) Atas Dasar Harga Pasar.

Perbedaan konsep neto di sini dan konsep bruto pada rincian (a) adalah karena faktor penyusutan. Dalam PDRN atas dasar harga pasar, komponen penyusutan telah dikeluarkan.

c. Produk Domestik Regional Neto Atas Dasar Biaya Faktor.

Perbedaan konsep biaya faktor di sini dan konsep harga pasar pada rincian (b) adalah karena faktor

pajak tidak langsung neto. Dalam PDRN atas dasar biaya faktor, pajak tidak langsung neto telah dikeluarkan.

d. Produk Regional Neto Atas Dasar Biaya Faktor

Perbedaan dengan konsep pada rincian (c) di atas adalah masalah domestiknya. Disebut produk domestik regional karena nilai tambah yang dihitung adalah seluruh nilai tambah yang timbul dari berbagai kegiatan ekonomi di suatu wilayah tanpa memperhatikan pemilikan atas produksinya, apakah milik penduduk wilayah tersebut ataukah milik penduduk wilayah lain. Sedangkan pada rincian (d), yaitu produk regional yang diperhitungkan adalah nilai tambah dari faktor produksi yang dimiliki oleh penduduk wilayah tersebut, baik beroperasi di dalam wilayah bersangkutan maupun beroperasi di luar wilayah. Oleh karena itu untuk sampai kepada produk regional, pendapatan atas faktor produksi milik penduduk wilayah lain harus dikeluarkan dan sebaliknya pendapatan atas faktor produksi milik penduduk wilayah bersangkutan yang berasal dari luar wilayah harus dimasukkan, yang selisihnya selanjutnya disebut sebagai faktor pendapatan neto dari luar wilayah. Jadi produk regional neto atas dasar biaya faktor merupakan produk domestik regional neto ditambah faktor pendapatan neto dari luar wilayah. Pengertian inilah yang sebenarnya merupakan pendapatan regional.

e. Pendapatan Regional Perkapita

Bila pendapatan regional ini dibagi dengan jumlah penduduk yang tinggal di daerah itu, maka akan dihasilkan suatu pendapatan regional.

1.3. Metode Penghitungan Pendapatan Regional

Penghitungan pendapatan regional dapat dilakukan melalui 3 (tiga) pendekatan (approach) :

a. Pendekatan Produksi (Production Approach)

Penghitungan nilai tambah dengan pendekatan ini diperoleh dari nilai produksi (output) dikurangi biaya antara. Output merupakan nilai dari barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu kegiatan produksi dalam satu periode tertentu, sedangkan biaya antara adalah barang dan jasa yang digunakan dalam proses kegiatan produksi yang sedang berjalan dimana barang-barang tersebut merupakan barang-barang yang biasanya habis sekali proses produksi atau mempunyai umur penggunaan yang kurang dari satu tahun. Pengeluaran atas balas jasa faktor produksi yaitu upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal, keuntungan serta penyusutan dan pajak tidak langsung neto bukan merupakan biaya antara. Demikian juga pengeluaran untuk pembelian/pembuatan barang-barang modal perusahaan bukan merupakan biaya antara.

b. Pendekatan Pendapatan (Income Approach)

Penghitungan nilai tambah dengan pendekatan ini diperoleh dari penjumlahan komponen-komponen nilai tambah itu sendiri. Seperti telah dijelaskan, nilai tambah bruto merupakan penjumlahan dari balas jasa faktor produksi yang komponennya terdiri dari upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan ditambah dengan penyusutan dan pajak tidak langsung neto.

c. Pendekatan Pengeluaran (Expenditure Approach)

Penghitungan melalui pendekatan ini dilakukan langsung terhadap pendapatan regional, yaitu dengan menjumlahkan pengeluaran konsumsi rumahtangga, pengeluaran konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap bruto, perubahan stok dan ekspor neto (ekspor-impor). Kalau data yang digunakan untuk menghitung pendapatan regional dengan ketiga pendekatan ini cukup konsisten, maka hasil estimasinya tentu tidak jauh berbeda. Selain ketiga pendekatan di atas, masih ada satu metode lagi yang kadang-kadang digunakan, terutama kalau tidak ada data sama sekali yaitu metode alokasi.

d. Metode Alokasi (allocation approach)

Penghitungan nilai tambah dengan metode ini diperoleh dengan mengalokasikan nilai tambah nasional untuk propinsi tersebut, berdasarkan suatu indikator sebagai alokatornya.

1.4. Cara Penyajian dan Angka Indeks

Agregat-agregat pendapatan seperti yang telah diuraikan di atas, secara seri dapat disajikan dalam dua bentuk yaitu atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan satu tahun dasar.

a. Penyajian atas dasar harga berlaku, semua agregat pendapatan atas dasar harga berlaku pada masing-masing tahunnya, baik pada saat menilai produksi dan biaya antara maupun pada penilaian komponen nilai tambah dan komponen pengeluaran produk domestik regional bruto.

b. Pada penyajian atas dasar harga konstan suatu tahun dasar, semua agregat pendapatan dinilai atas dasar harga tetap yang terjadi pada tahun dasar. Karena menggunakan harga tetap, maka perkembangan agregat pendapatan dari tahun ke tahun semata-mata karena perkembangan riil dan bukan fluktuasi kenaikan harga.

Agregat-agregat pendapatan juga disajikan dalam bentuk angka indeks yaitu indeks perkembangan, laju pertumbuhan dan indeks implisit, yang masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Indeks perkembangan, diperoleh dengan membagi nilai-nilai pada masing-masing tahun dengan nilai pada tahun dasar, dikalikan 100. Indeks ini menunjukkan tingkat perkembangan agregat pendapatan dari tahun ke tahun terhadap tahun dasarnya.
2. Angka laju pertumbuhan, diperoleh dengan membagi nilai pada masing-masing tahun dengan nilai pada tahun sebelumnya dikalikan 100, kemudian dikurangi dengan 100. Angka ini menunjukkan tingkat perkembangan agregat pendapatan untuk masing-masing tahun dibandingkan tahun sebelumnya.
3. Indeks harga implisit, diperoleh dengan membagi nilai atas dasar harga berlaku dengan nilai atas dasar harga konstan untuk masing-masing tahunnya, dikalikan 100. Indeks ini menunjukkan tingkat perkembangan harga dari agregat pendapatan terhadap harga pada tahun dasar. Selanjutnya bila dari indeks implisit ini dibuatkan indeks berantainya, akan terlihat tingkat perkembangan harga setiap tahun terhadap tahun sebelumnya.

1.5. Pendapatan Regional Atas Dasar Harga Konstan

Seperti telah diketahui bahwa angka-angka pendapatan atas dasar harga konstan adalah sangat penting untuk melihat pertumbuhan riil dari tahun ke tahun bagi setiap agregat ekonomi. Agregat ekonomi yang dimaksud adalah produk domestik regional bruto, produk regional bruto dan pendapatan regional.

Pertumbuhan riil dari agregat ekonomi diturunkan dengan cara menghilangkan pengaruh dari perubahan harga pada angka atas dasar harga berlaku, sehingga terbentuklah angka atas dasar harga konstan. Bila angka atas dasar harga konstan dari agregat-agregat ekonomi yang berbeda dinyatakan dalam harga tahun dasar yang sama, maka analisis perbandingan akan mungkin dilakukan dan seluruh agregat tersebut bisa diturunkan dari komponen-komponennya.

Tiga metode dasar berikut adalah untuk merubah angka atas dasar harga berlaku menjadi angka atas dasar harga konstan. Metode-metode tersebut pada dasarnya dapat digunakan untuk seluruh komponen PDRB seperti permintaan akhir, output, input antara dan komponen pendapatan dari nilai tambah.

a. Revaluasi

Metode ini dilakukan dengan cara menilai produksi masing-masing tahun dengan menggunakan harga tahun dasar.

b. Ekstrapolasi

Metode ini dilakukan dengan cara memperbarui (updating) nilai tahun dasar sesuai dengan indeks produksi atau tingkat pertumbuhan riil dari tahun sebelumnya.

c. D e f l a s i

Metode ini dilakukan dengan membagi nilai masing-masing tahun dengan relatif harga yang sesuai (indeks harga x 1/100).

Metode penghitungan yang sebenarnya bisa menggunakan kombinasi dari ketiga metode tersebut.

1.6. Masalah dan Keterbatasan

Yang menjadi masalah pokok dalam penghitungan pendapatan regional adalah bagaimana memperkirakan secara tepat pendapatan suatu daerah/regional, agar hasil penghitungan tersebut dapat mencerminkan keadaan perekonomian yang sebenarnya, sehingga dapat digunakan oleh para pembuat keputusan dengan sebaik-baiknya dalam melaksanakan kebijaksanaan pembangunan perekonomian.

Dalam penghitungan pendapatan regional beberapa masalah yang sering dihadapi dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Dari hasil pendataan atau catatan administrasi berbagai instansi seringkali data yang tersedia untuk lingkup wilayah tidak sama dengan wilayah administrasi, sehingga pemecahan menurut wilayah/regional terbentur kepada masalah teknis penyajian/kerahasiaan data.

Contoh:

Wilayah eksploitasi PLN biasanya tidak memperhatikan batas wilayah administrasi sehingga pemecahan menurut wilayah administrasi cukup sukar.

2. dalam suatu perusahaan yang bersifat multi regional, sistem pembukaan perusahaan biasanya dilakukan secara sentral sehingga sukar untuk diperhitungkan

secara regional. Misalnya, perusahaan penerbangan, pelayaran dan sebagainya.

3. Hasil suatu sampel survei atau proyeksi biasanya direncanakan untuk kepentingan nasional. Gambaran yang diperoleh hanya sampai tingkat propinsi. Dengan demikian menjadi kurang tepat bila diturunkan untuk kotamadya.
4. Masalah lalu lintas perdagangan antara kotamadya lebih sukar diteliti dibandingkan dengan lalu lintas perdagangan antar propinsi dan antar negara. Di dalam lingkup regional ekspor dan impor akan mencakup lalu lintas perdagangan melalui darat, antar pulau dan luar negeri. Sedangkan pada lingkup nasional hanya menyangkut perdagangan dengan luar negeri saja.
5. Masalah lain untuk penghitungan PDRB menurut kotamadya di DKI Jakarta, adalah mobilitas penduduk antar wilayah yang cukup tinggi, kegiatan produksi dan distribusi antar wilayah yang sulit dibedakan serta sangat minimnya data sosial ekonomi yang menggambarkan secara terinci dan jelas menurut wilayah kota tersebut.

Meskipun penghitungan pendapatan regional di tingkat propinsi dan kotamadya, banyak memenuhi hambatan terutama dari segi tersedianya data, namun usaha-usaha untuk tetap dapat menyajikan angka-angka pendapatan regional ini serta penyempurnaannya akan terus dilakukan. Namun demikian perlu kiranya menjadi bahan pertimbangan bahwa semakin rendah unit wilayah yang akan dihitung akan semakin langka dan sulit data yang tersedia. Di samping itu keadaan perwilayahan yang semakin terbuka, menyulitkan pengumpulan datanya.

II. URAIAN SEKTORAL

Uraian sektoral yang disajikan pada bab ini mencakup ruang lingkup dan definisi dari masing-masing sektor dan sub sektor, cara-cara perhitungan nilai tambah baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 1993, serta sumber datanya.

2.1. Sektor Pertanian.

Kegiatan pertanian di DKI Jakarta mencakup usaha tanaman bahan makanan dan tanaman hias, usaha pemeliharaan ternak serta usaha pemeliharaan ikan, penangkapan ikan dan pengambilan hasil-hasil laut. Kegiatan pertanian lainnya seperti penanaman tanaman perdagangan dan kehutanan tidak terdapat di DKI Jakarta.

2.1.1. Tanaman Bahan Makanan.

Subsektor ini mencakup komoditi tanaman bahan makanan seperti padi, jagung, ketela pohon, ketela rambat, kacang-kacangan, sayur-sayuran dan buah-buahan.

Data produksi diperoleh dari Biro Pusat Statistik (BPS) dan Dinas Pertanian, sedangkan data harga seluruhnya bersumber pada data harga yang dikumpulkan oleh BPS.

Nilai tambah bruto atas dasar harga berlaku diperoleh dengan cara pendekatan produksi yaitu mengalikan setiap jenis kuantum produksi dengan masing-masing harganya; kemudian hasilnya di kurangi dengan biaya antara atas dasar harga berlaku pada tahun yang bersangkutan.

Nilai tambah bruto atas dasar harga konstan 1993

dihitung dengan cara revaluasi, yaitu mengalikan produksi pada tahun bersangkutan dengan harga pada tahun 1993, kemudian dikurangkan lagi dengan biaya antara atas dasar harga konstan 1993.

2.1.2. Tanaman Lainnya.

Subsektor ini mencakup kegiatan bercocok tanam dan pengolahan tanah lainnya untuk menghasilkan jenis tanaman yang biasa di gunakan sebagai tanaman hias baik didalam pot atau lainnya maupun langsung ditanam di pekarangan atau halaman. Jenis komoditinya mencakup antara lain tanaman anggrek dan bunga anggreknya, berbagai tanaman bunga serta tanaman hias lainnya.

Data produksi diperoleh dari Dinas Pertanian DKI Jakarta, sedangkan data harga berupa harga perdagangan besar diperoleh dari BPS.

Nilai tambah bruto atas dasar harga berlaku dan konstan 1993 dihitung dengan cara yang sama seperti yang dilakukan pada tanaman bahan makanan.

2.1.3. Peternakan dan Hasil-hasilnya.

Subsektor ini mencakup produksi ternak besar, ternak kecil, unggas maupun hasil-hasil ternak, seperti sapi, kerbau, babi, kambing, domba, telur, susu segar serta hasil pematangan hewan. Produksi ternak diperkirakan sama dengan jumlah ternak yang di potong ditambah perubahan stock populasi ternak dan ekspor ternak netto.

Data mengenai jumlah ternak yang dipotong, produksi susu dan telur diperoleh dari Dinas Peternakan DKI Jakarta. Sedangkan data mengenai harga ternak

diperoleh dari BPS.

Nilai tambah bruto atas dasar harga berlaku dan harga konstan 1993 dihitung dengan cara mengalikan nilai produksi dengan rasio nilai tambah berdasarkan tabel input-output DKI Jakarta 1990.

2.1.4. P e r i k a n a n .

Komoditi yang dicakup adalah semua hasil dari kegiatan perikanan laut, perairan umum, tambak, kolam, sawah dan karamba, serta pengolahan sederhana (pengeringan dan penggaraman ikan).

Data mengenai produksi diperoleh dari Dinas Perikanan DKI Jakarta, sedangkan data mengenai harga diperoleh dari BPS.

Perhitungan nilai tambah bruto atas dasar harga berlaku dan konstan 1993 dilakukan dengan cara yang sama seperti pada sub sektor peternakan.

2.2. Sektor Industri Pengolahan.

Berbeda dengan seri tahun dasar 1983 yang merinci Sektor Industri Pengolahan ke dalam dua subsektor, yaitu industri besar/sedang dan industri kecil/rumahtangga, maka pada seri tahun dasar 1993, pengelompokan didasarkan pada jenis produksi barang yang dihasilkan yang meliputi industri migas dan industri tanpa migas. Namun karena industri migas tidak terdapat di Jakarta, maka pembahasan hanya dibatasi pada industri tanpa migas.

Subsektor industri tanpa migas mencakup industri

Subsektor industri tanpa migas mencakup industri makanan, minuman & tembakau; Industri tekstil, barang dari kulit & alas kaki; Industri barang dari kayu dan hasil hutan lainnya; Industri kertas dan barang cetakan; Industri pupuk, kimia dan barang dari karet; Industri semen dan barang galian bukan logam; Industri logam dasar besi dan baja; Industri alat angkutan, mesin dan peralatannya; serta industri barang lainnya yang belum tercakup. Data mengenai indikator produksi diperoleh melalui Survei Tahunan Industri Besar/Sedang, Survei Triwulanan Industri Besar/Sedang, Survei Industri Kecil dan Kerajinan Rumahtangga serta Dinas-dinas terkait. Penghitungan Output atas dasar harga konstan 1993 untuk kelompok industri besar/sedang dihitung dengan cara ekstrapolasi menggunakan indeks produksi, sedangkan untuk penghitungan output kelompok industri kecil dan rumahtangga dengan metode ekstrapolasi menggunakan indeks perkembangan jumlah tenaga kerja.

Output atas dasar harga berlaku untuk kelompok industri besar/sedang dihitung secara inflasi dengan indeks harga perdagangan besar (IHPB) barang-barang industri sebagai inflator. Sedangkan untuk menghitung output kelompok industri kecil dan kerajinan rumahtangga digunakan cara deflasi dengan IHPB barang-barang industri sebagai deflator. Penghitungan nilai tambah bruto atas dasar harga berlaku dan konstan 1993 dilakukan dengan mengalikan rasio nilai tambah terhadap output.

2.3. Sektor Listrik, Gas dan Air Minum.

Data produksi yang disajikan dalam publikasi ini adalah data dari Perusahaan Listrik Negara (PLN), Perusahaan Negara Gas (PN. Gas) dan Perusahaan Air Minum.

Output masing-masing subsektor mencakup semua produksi yang di hasilkan dari pelbagai kegiatan sesuai dengan ruang lingkup dan definisinya.

2.3.1. L i s t r i k.

Subsektor ini mencakup kegiatan produksi dan distribusi listrik yang diusahakan oleh Perusahaan Umum Listrik Negara (PLN). Data produksi, harga dan biaya antara subsektor ini di peroleh dari Survei Tahunan Perusahaan Umum Listrik Negara.

Nilai tambah bruto atas dasar harga berlaku dihitung dengan pendekatan produksi. Sedangkan Nilai tambah bruto atas dasar harga konstan 1993 dihitung dengan cara deflasi, dimana Indeks Tarif per Kwh digunakan sebagai deflator.

2.3.2. G a s.

Yang dicakup dalam subsektor ini adalah produksi gas dari perusahaan umum gas negara (PN. Gas). Data produksi, harga dan biaya-biaya yang digunakan diperoleh dari Survei Tahunan Perusahaan Umum Gas Negara.

Nilai tambah bruto atas dasar harga berlaku dihitung dengan pendekatan produksi. Sedangkan nilai tambah bruto atas dasar harga konstan 1993 dihitung dengan cara deflasi, dimana indeks tarif digunakan sebagai deflator.

2.3.3. Air Minum.

Subsektor ini mencakup air bersih yang diusahakan oleh Perusahaan Air Minum. Data produksi, harga dan

Tahunan Perusahaan Daerah Air Minum.

Nilai tambah bruto atas dasar harga berlaku dihitung dengan pendekatan produksi. Sedangkan nilai tambah bruto atas dasar harga konstan 1993 dihitung dengan cara deflasi, dimana indeks tarif digunakan sebagai deflator.

2.4. Sektor Bangunan.

Sektor bangunan mencakup semua kegiatan pembangunan, fisik konstruksi, baik berupa gedung, jalan, jembatan, terminal, pelabuhan maupun jaringan listrik, gas, air, telepon dan sebagainya. Output sektor bangunan diperoleh dari publikasi Statistik Bangunan/Konstruksi dan pengolahan hasil Susenas 1993. Sedangkan untuk memperoleh nilai tambah bruto atas dasar harga berlaku dihitung dengan cara mengalikan output dengan rasio nilai tambah berdasarkan hasil Survei Tahunan Konstruksi.

Nilai tambah bruto atas dasar harga konstan 1993 dihitung dengan cara deflasi, dimana IHPB barang-barang konstruksi digunakan sebagai deflator.

2.5. Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran.

2.5.1. Perdagangan Besar dan Eceran..

Output perdagangan merupakan jumlah margin perdagangan yang timbul dari seluruh komoditi yang diperdagangkan, sedangkan margin perdagangan itu sendiri merupakan selisih antara nilai jual dengan nilai pembelian setelah dikurangi dengan biaya angkutan yang dikeluarkan oleh pedagang.

Output atas dasar harga berlaku diperkirakan

berdasarkan jumlah tenaga kerja dikalikan dengan rata-rata output per tenaga kerja. Nilai tambah bruto atas dasar harga berlaku di peroleh dengan cara mengalikan nilai output dengan rasio nilai tambah berdasarkan Survei Khusus Perdagangan dan Jasa 1994.

Nilai tambah bruto atas dasar harga konstan 1993 dihitung dengan cara deflasi dengan Indeks Perdagangan Besar sebagai deflator.

2.5.2. H o t e l.

Subsektor ini mencakup semua hotel, baik berbintang maupun tidak berbintang serta berbagai jenis penginapan lainnya.

Output dihitung dengan cara mengalikan jumlah kamar dengan output per kamart. Nilai tambah bruto atas dasar harga berlaku diperoleh dengan cara mengalikan nilai output dengan rasio nilai tambah berdasarkan Survei Khusus Pendapatan Regional 1994. Nilai tambah bruto atas dasar harga konstan 1993 dihitung dengan cara deflasi dengan indeks harga konsumen sebagai deflator.

2.5.3. R e s t o r a n

Subsektor ini mencakup kegiatan penyediaan dan penjualan makanan dan minuman jadi. Output diperoleh dari perkalian antara jumlah tenaga kerja dengan rata-rata output per tenaga kerja. Nilai tambah bruto atas dasar harga berlaku diperoleh dengan cara mengalikan nilai output dengan rasio nilai tambah berdasarkan Tabel Input-Output DKI Jakarta 1990.

Nilai tambah bruto atas dasar harga konstan 1993

dihitung dengan cara deflasi dengan IHK makanan sebagai deflator.

2.6. Sektor Angkutan dan Komunikasi.

Sektor ini mencakup kegiatan pengangkutan umum untuk barang dan penumpang, baik melalui darat, laut, sungai/danau dan udara, termasuk jasa penunjang angkutan dan komunikasi.

2.6.1. Pengangkutan.

a. Angkutan Rel.

Nilai tambah bruto atas dasar harga berlaku dihitung berdasar data yang diperoleh dari Perusahaan Umum Kereta Api (PJKA). Nilai tambah bruto atas dasar harga konstan 1993 dihitung dengan cara ekstrapolasi dengan menggunakan indeks produksi banyaknya penumpang dan barang yang diangkut.

b. Angkutan Jalan Raya.

Subsektor ini meliputi kegiatan pengangkutan barang dan penumpang yang dilakukan oleh perusahaan angkutan umum, baik bermotor ataupun tidak bermotor, seperti bis, truk, bemo, taksi, becak dan sebagainya. Perkiraan nilai tambah bruto atas dasar harga berlaku didasarkan pada data jumlah armada angkutan umum barang dan penumpang yang diperoleh dari Dinas Lalulintas Angkutan Jalan Raya (DLLAJR).

Nilai tambah bruto atas dasar harga konstan 1993 dihitung dengan cara ekstrapolasi dengan menggunakan indeks produksi masing-masing jenis angkutan jalan raya.

c. Angkutan Laut.

Meliputi kegiatan pengangkutan penumpang dan barang dengan menggunakan kapal yang diusahakan oleh perusahaan pelayaran milik nasional baik yang melakukan trayek dalam negeri maupun internasional. Karena kegiatan angkutan laut tidak terdapat di daerah ini, maka nilai tambah yang dihasilkan tidak ada.

d. Angkutan Udara.

Mencakup kegiatan pengangkutan penumpang, barang dan kegiatan lain yang berkaitan dengan penerbangan yang dilakukan oleh perusahaan penerbangan milik nasional, baik penerbangan dalam negeri maupun internasional.

Karena kegiatan angkutan udara tidak terdapat di daerah ini, maka nilai tambah yang dihasilkan tidak ada.

e. Jasa Penunjang Angkutan.

Meliputi kegiatan pemberian jasa dan penyediaan fasilitas yang sifatnya menunjang dan berkaitan dengan kegiatan pengangkutan, seperti terminal dan parkir, keagenan barang dan penumpang, ekspedisi, bongkar muat, penyimpanan dan pergudangan serta jasa penunjang lainnya. Output atas dasar harga berlaku diperkirakan dengan perkalian masing-masing unit produksi dengan rata-rata tarifnya.

Nilai tambah bruto atas dasar harga berlaku didasarkan pada Tabel Input Output DKI Jakarta tahun 1990. Sedangkan nilai tambah bruto atas dasar harga konstan 1993 dihitung dengan cara ekstrapolasi dengan menggunakan indeks masing-masing unit produksi.

2.6.2. Komunikasi.

Kegiatan yang dicakup adalah jasa pos dan giro, telekomunikasi dan jasa penunjang komunikasi.

a. Pos dan Giro.

Meliputi kegiatan pemberian jasa pos dan giro seperti pengiriman surat, wesel, paket, jasa giro, jasa tabungan dan sebagainya.

Perkiraan nilai tambah bruto atas dasar harga berlaku di dasarkan pada data produksi yang diperoleh dari Perusahaan Umum Pos dan Giro, sedangkan struktur biaya yang didasarkan pada Tabel Input Output DKI Jakarta tahun 1990.

Nilai tambah bruto atas dasar harga konstan 1993 dihitung dengan cara ekstrapolasi, menggunakan indeks gabungan dari jumlah surat yang dikirim, barang yang dipaketkan dan sebagainya.

b. Telekomunikasi.

Mencakup kegiatan pemberian jasa dalam hal pemakaian hubungan-hubungan telepon, telegraf dan teleks. Nilai tambah bruto atas dasar harga berlaku dihitung berdasarkan data yang diperoleh dari Perum Telekomunikasi dan PT. Indosat.

Nilai tambah bruto atas dasar harga konstan 1993 dihitung dengan cara deflasi dengan IHPB umum sebagai deflator.

c. Jasa Penunjang komunikasi.

Mencakup kegiatan wartel/warpotel/warparpotel, radio panggil dan telepon seluler.

Output diperoleh dari perkalian antara indikator produksi masing-masing kegiatan dengan output per indikatornya. Sedangkan nilai tambah bruto atas

dasar harga berlaku diperoleh dengan mengalikan nilai output dengan rasio nilai tambah bruto. Nilai tambah bruto atas dasar harga konstan 1993 dihitung secara ekstrapolasi dengan indikator produksi masing-masing kegiatan sebagai ekstrapolasi.

2.7. Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan.

Sektor ini meliputi kegiatan bank, lembaga keuangan tanpa bank, sewa bangunan serta jasa perusahaan.

2.7.1. B a n k.

Nilai tambah bruto subsektor bank atas dasar harga berlaku diperoleh dari bank Indonesia.

Nilai tambah bruto atas dasar harga konstan 1993 dihitung dengan cara deflasi dimana angka indeks harga konsumen dan indeks harga implisit PDRB tanpa sektor bank dan lembaga keuangan lainnya dipakai sebagai deflator masing-masing untuk upah dan gaji serta surplus usaha.

2.7.2. Lembaga Keuangan Tanpa Bank (LKBB) dan Jasa Penunjang Keuangan.

a. Lembaga Keuangan Tanpa Bank.

Mencakup kegiatan asuransi, koperasi, lembaga pembiayaan, pegadaian dan dana pensiun. Penghitungan output atas dasar harga berlaku diperoleh dengan mengalokasikan output nasional berdasarkan peranan kegiatan LKBB di Jakarta. Demikian juga untuk biaya antara dan nilai tambahnya.

Nilai tambah bruto atas harga konstan 1993 diperoleh

dengan cara deflasi dengan Indeks Harga Konsumen Umum sebagai deflator.

b. Jasa Penunjang Keuangan.

Mencakup kegiatan perdagangan valuta asing, Bursa Efek Jakarta (BEJ), Bursa Paralel Indonesia (BPI), Bursa Komoditi, pialang, pedagang efek, penjamin emisi, wali amanat dan penanggung. Untuk keadaan tahun 1993-1994, hanya Kotamadya Jakarta Pusat yang memiliki kegiatan Jasa Penunjang Keuangan selain pedagang valuta asing.

Output pedagang valuta asing diperoleh dari perkalian antara indikator produksi dengan output per indikator, sedangkan untuk kegiatan BEJ, BPI dan Bursa Komoditi diperoleh dari laporan keuangan perusahaan. Kegiatan lain, seperti pialang, pedagang efek dan sebagainya diperoleh dengan mengalokasikan output nasional berdasarkan kegiatannya di Jakarta.

Nilai tambah bruto atas dasar harga berlaku diperoleh dengan mengalikan nilai output dengan rasio nilai tambah bruto. Sedangkan nilai tambah bruto atas dasar harga konstan 1993 dihitung dengan cara deflasi menggunakan indeks harga saham gabungan untuk kegiatan bursa dan indeks harga konsumen untuk kegiatan lainnya.

2.7.3. Sewa Bangunan.

Mencakup usaha persewaan bangunan dan tanah, baik yang menyangkut bangunan tempat tinggal maupun bukan tempat tinggal seperti perkantoran, pertokoan serta usaha persewaan tanah persil.

Output untuk persewaan bangunan tempat tinggal

diperoleh dari perkalian antara pengeluaran konsumsi rumahtangga per kapita untuk sewa rumah, kontrak rumah, sewa beli rumah dinas, perkiraan sewa rumah, pajak dan pemeliharaan rumah dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Data usaha persewaan bangunan tempat tinggal diperoleh dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dan Sensus Penduduk (SP). Sedangkan output usaha persewaan bangunan bukan tempat tinggal diperoleh dari perkalian antara luas bangunan yang disewakan dengan rata-rata tarif sewa per meter persegi.

Selanjutnya nilai tambah bruto atas dasar harga berlaku diperoleh dari hasil perkalian antara rasio nilai tambah bruto dengan outputnya. Sedangkan nilai tambah bruto atas dasar harga konstan 1993 diperoleh dengan cara deflasi menggunakan Indeks Harga Konsumen Tempat Tinggal.

2.7.4. Jasa Perusahaan.

Mencakup kegiatan pemberian jasa hukum (advokat dan notaris), jasa akuntansi dan pembukuan, jasa pengolahan dan penyajian data, jasa bangunan/arsitek dan teknik, jasa periklanan dan riset pemasaran, serta jasa persewaan mesin dan peralatan.

Output jasa perusahaan diperoleh dari perkalian antara jumlah tenaga kerja dengan rata-rata output per tenaga kerja, sedangkan nilai tambah bruto atas dasar harga berlaku diperoleh dari hasil perkalian antara rasio nilai tambah bruto dengan outputnya. Selanjutnya perkiraan nilai tambah bruto atas dasar harga konstan 1993 diperoleh dengan cara ekstrapolasi dengan jumlah tenaga kerja sebagai ekstrapolatornya.

2.8. Sektor Jasa-jasa.

Mencakup jasa pemerintahan umum dan pertahanan serta jasa swasta yang meliputi jasa sosial kemasyarakatan, jasa hiburan dan rekreasi serta jasa perorangan dan rumahtangga.

2.8.1. Pemerintahan Umum dan Pertahanan.

Cakupan subsektor ini meliputi administrasi pemerintahan umum dan pertahanan serta jasa pemerintahan lainnya. Subsektor pemerintahan umum dan pertahanan mencakup semua departemen dan non departemen, badan/lembaga tinggi negara, kantor-kantor pemerintah pusat dan daerah serta badan-badan yang berhubungan dengan kegiatan administrasi pemerintahan dan pertahanan, termasuk juga kegiatan yang bersifat jasa seperti sekolah-sekolah pemerintah, universitas negeri, rumah sakit pemerintah, museum dan perpustakaan milik pemerintah dan sebagainya.

Sumbangan sektor pemerintahan dan pertahanan terhadap produk domestik regional bruto terdiri dari upah dan gaji rutin pegawai pemerintah pusat dan daerah, perkiraan komponen upah dari belanja pembangunan ditambah dengan perkiraan penyusutan sebesar 5 persen. Data yang dipakai didasarkan pada realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk pemerintah daerah. Sedangkan pemerintah pusat dan Hankam datanya diperoleh dengan mengalokasikan belanja pegawai nasional berdasarkan jumlah pegawai negeri pusat yang ada di DKI Jakarta serta jumlah penduduk sebagai alokatornya.

Nilai tambah bruto atas dasar harga konstan 1993

diperoleh dengan cara ekstrapolasi dengan menggunakan indeks tertimbang jumlah pegawai negeri sebagai ekstrapolatornya .

2.8.2. Jasa-jasa Swasta.

a. Jasa Sosial dan Kemasyarakatan.

Mencakup jasa pendidikan, jasa kesehatan serta jasa kemasyarakatan lainnya, seperti jasa penelitian, rumah sakit, dokter praktek, panti asuhan, panti werdha, yayasan pemeliharaan anak cacat dan sebagainya, terbatas yang dikelola oleh swasta saja. Kegiatan-kegiatan sejenis yang dikelola oleh pemerintah termasuk dalam sektor pemerintahan.

Output atas dasar harga berlaku diperoleh berdasarkan perkalian antara jumlah murid menurut tingkatan, jumlah tempat tidur rumah sakit, jumlah dokter, jumlah anak yang diasuh, jumlah orang tua yang dirawat dan sebagainya dengan rata-rata outputnya.

Nilai tambah bruto atas dasar harga berlaku berdasarkan rasio nilai tambah terhadap output yang bersumber dari hasil Survei Khusus Jasa-jasa DKI Jakarta tahun 1994. Nilai tambah bruto atas dasar harga konstan 1993 dihitung dengan cara ekstrapolasi dengan perkembangan masing-masing indikator produksi sebagai ekstrapolatornya.

b. Jasa Hiburan dan Kebudayaan.

Meliputi kegiatan produksi dan distribusi film, reproduksi film video, jasa bioskop dan panggung hiburan, perpustakaan, museum, gedung olah raga, kolam renang, klub malam, taman hiburan, lapangan golf,

lapangan tenis, bilyard, klub olah raga, artis film, artis panggung, pub, bar, karaoke, video klip, studio televisi dan stasiun pemancar radio yang dikelola oleh swasta.

Output atas dasar harga berlaku diperoleh dengan menggunakan metode pendekatan produksi, yaitu output diperoleh dari hasil perkalian antara indikator produksi dengan indikator harga. Output bioskop diperoleh dari hasil perkalian antara jumlah penonton dengan rata-rata output per penonton. Sedangkan output jasa hiburan dan rekreasi lainnya diperoleh dari hasil perkalian antara jumlah tenaga kerja dengan rata-rata output per tenaga kerja.

Selanjutnya nilai tambah bruto atas dasar harga berlaku diperoleh dari hasil perkalian output dengan rasio nilai tambah yang bersumber dari Survei Khusus Jasa-jasa DKI Jakarta tahun 1994.

Perkiraan nilai tambah bruto atas dasar harga konstan 1993 dihitung dengan cara ekstrapolasi menggunakan indeks indikator produksi masing-masing kegiatan.

c. Jasa Perorangan dan Rumahtangga.

Meliputi segala jenis kegiatan jasa yang pada umumnya melayani perorangan dan rumahtangga, yang terdiri dari jasa perbengkelan/reparsi, jasa pembantu rumahtangga dan jasa perorangan lainnya, seperti tukang binatu, tukang cukur, tukang jahit, tukang semir sepatu dan sejenisnya.

Output atas dasar harga berlaku untuk jasa perbengkelan serta jasa perorangan dan rumahtangga lainnya diperoleh dari hasil perkalian antara jumlah tenaga kerja dengan rata-rata output per tenaga kerja masing-masing kegiatan. Sedangkan output jasa pembantu rumahtangga, pengasuh bayi dan sejenisnya diperoleh dari perkalian antara pengeluaran per

kapita untuk pembantu rumahtangga dengan jumlah penduduk pertengahan tahun.

Selanjutnya nilai tambah bruto atas dasar harga berlaku diperoleh dari hasil perkalian antara output dengan rasio nilai tambah bruto yang bersumber dari Survei Khusus Jasa-jasa DKI Jakarta tahun 1994. Sedangkan nilai tambah bruto atas dasar harga konstan 1993 diperoleh dengan cara ekstrapolasi menggunakan indeks indikator produksi masing-masing kegiatan.

<https://jakbarkota.bps.go.id>

III TINJAUAN EKONOMI KOTAMADYA JAKARTA BARAT 1993-1994

3.1. Pendahuluan

Kotamadya Jakarta Barat mempunyai luas wilayah 126,08 km persegi dan sebagai daerah administratif terdiri dari 8 (delapan) kecamatan dan 56 kelurahan. Secara geografis, sebelah utara berbatasan dengan kecamatan Penjaringan Jakarta Utara, sebelah Selatan dengan Jakarta Selatan, sebelah Barat dengan Kabupaten Tangerang dan sebelah Timur dengan Kecamatan Gambir wilayah kotamadya Jakarta Pusat.

Berdasarkan data tofografi, wilayah ini terletak 7 meter di atas permukaan laut dengan permukaan tanah yang landai, dan sebagian wilayahnya berbatasan dengan laut, kecamatan Cengkareng dan Kalideres.

Dalam rencana pembangunan DKI Jakarta, Kotamadya Jakarta Barat termasuk dalam Wilayah Pengembangan Barat (WP.B), arah pembangunan bidang ekonomi didorong untuk menjadi sentra jasa, perdagangan, pemukiman dan lingkungan industri/ yang terbatas seperti tertuang dalam Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) 1985 - 2005.

Sesuai dengan letak geografis, potensi dan keadaan wilayahnya, maka struktur perekonomiannya tidak banyak terpengaruh oleh sektor pertanian, tetapi lebih banyak bertumpu pada sektor perdagangan, industri, perbankan dan sektor pengangkutan serta komunikasi. Disamping itu dengan tumbuh serta berkembangnya kawasan pemukiman baik yang dibangun oleh real estate atau developer maupun usaha penduduk yang memerlukan tempat pemukiman maka semakin jelas dan nyata arah pengembangan kotamadya Jakarta Barat diwaktu mendatang akan menjadi semakin penting sebagai bagian dari sentra jasa kota Jakarta.

Pada uraian berikut dicoba untuk menelaah perkembangan dan pertumbuhan ekonomi di Jakarta Barat yang telah dicapai dari tahun 1993 dan 1994, hal ini erat kaitannya dengan prestasi dan kondisi yang terjadi pada tahun-tahun awal Pelita VI dan diharapkan akan bermanfaat serta sebagai bahan masukan dalam merencanakan dan merumuskan kebijaksanaan pembangunan Kotamadya Jakarta Barat pada tahun-tahun selanjutnya.

3.2. Pertumbuhan Ekonomi Kotamadya Jakarta Barat

Kotamadya Jakarta Barat, pada tahun 1993 berpenduduk 1,92 juta jiwa, dan jumlahnya terus meningkat, sehingga pada tahun 1994 diperkirakan mencapai 2,06 juta jiwa. Pesatnya pertumbuhan penduduk sangat dipengaruhi oleh 2 (dua) faktor utama yaitu kelahiran dan urbanisasi. Urbanisasi, terutama pendatang usia muda yang berusaha mencari lapangan pekerjaan di kota sangat terasa mewarnai tingginya pertumbuhan penduduk. Hal ini terjadi karena adanya faktor daya dorong dan daya tarik (Pull and push factor) kehidupan kota. Mereka tertarik karena adanya celah-celah kehidupan ekonomi yang dirasa dapat mereka masuki atau mereka garap untuk meningkatkan kualitas hidup. Akibat dari kedua faktor ini menyebabkan bertambahnya kepadatan penduduk semakin cepat.

Masalah kepadatan penduduk yang terus meningkat dan lapangan kerja akan terus menjadi beban wilayah Kotamadya Jakarta Barat, oleh karena itu perkembangan dan pertumbuhan ekonomi haruslah terus dipacu sedemikian rupa sehingga tingkat kesejahteraan masyarakat yang telah dicapai dapat terus ditingkatkan. Usaha pemerintah daerah untuk memacu pertumbuhan ekonomi secara terus menerus akan meningkatkan pendapatan masyarakat secara riil serta akan membuka lapangan usaha yang baru yang dapat dimasuki oleh penduduk dan pada akhirnya bermuara pada kesempatan kerja dan pemerataan pendapatan.

Usaha, kebijaksanaan serta aktivitas ini berjalan sepanjang tahun bahkan terus dipacu sedemikian rupa dengan penyediaan sarana dan prasarana, dampak dari kemauan yang diikuti dengan kegiatan positif akan meningkatkan pula pendapatan penduduk, hal ini tercermin pada Agregat Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) baik berdasarkan harga berlaku maupun harga konstan.

Pertumbuhan ekonomi sebagai salah satu indikator/ukuran yang dipakai dalam menilai keberhasilan telah memperlihatkan hasil yang positif. Selama Pelita V rata-rata pertumbuhan ekonomi Kotamadya Jakarta Barat tercatat sebesar 8,13 persen, angka ini hampir sama dengan pertumbuhan ekonomi Propinsi DKI Jakarta dan jauh diatas angka nasional yang tercatat sekitar 7 persen.

Penghitungan dengan menggunakan tahun dasar 1993 mengalami perubahan yang mendasar baik dari segi cakupan serta telah mendeteksi perubahan yang terjadi secara nasional maupun wilayah (regional). Berdasarkan perhitungan yang baru tersebut maka besarnya pertumbuhan ekonomi Kotamadya Jakarta Barat tahun 1994 mencapai 7,27 persen, angka ini memang lebih rendah dari pertumbuhan selama Pelita V, namun kedua angka ini tidak dapat langsung dibandingkan tapi masih diperlukan adjusment terlebih dahulu, namun demikian dalam perhitungan ini belum dapat dibandingkan seperti yang disebutkan diatas.

**Tabel A: PDRB DAN LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI KOTAMADYA
JAKARTA BARAT TAHUN 1993 - 1994**

TAHUN	HARGA BERLAKU		HARGA KONSTAN 1993	
	PDRB (Juta Rp)	KENAIKAN (%)	PDRB (Juta Rp)	KENAIKAN (%)
1993	9 770 173	-	9 770 173	-
1994	11 351 871	16,19	11 351 871	7,27

3.3. Perkembangan Ekonomi Sektoral dan Peranannya

Kotamadya di DKI Jakarta sebagai wilayah administratif adalah sebagai bagian dari suatu sistem dan struktur pemerintahan, karena itu dalam perkembangan daerah seterusnya disebutkan bahwa kotamadya adalah sebagai perpanjangan tangan dan pelaksana kegiatan yang ditetapkan propinsi, sehingga kebijaksanaan pengembangan wilayah tidak hanya ditentukan oleh walikota tetapi juga sangat dipengaruhi oleh keputusan instansi itingkat atas seperti Bappeda dan instansi terkait. Walaupun demikian usaha pemerintah daerah dalam hal ini kotamadya tidak mengalami penurunan, akan tetapi menunjukkan grafik yang semakin meningkat sesuai dengan misi pengembangan daerah.

Dampak positif apa yang disebutkan di atas adalah semakin meningkatnya peran sektor-sektor ekonomi dalam pengembangan daerah, ini dapat dilihat dari kontribusi masing-masing sektor terhadap pembentukan PDRB serta perkembangannya/pertumbuhannya selama dua tahun terakhir.

Dilihat dari perkembangan/pertumbuhan sektor ada beberapa hal yang menarik untuk diamati. Sesuai dengan Rancangan Umum Tata Ruang (RUTR) DKI Jakarta tahun 1985 - 2005 dan penjabarannya dalam Rencana Bagian Wilayah Kota (RBWK), Kotamadya Jakarta Barat diarahkan pada sektor Jasa-jasa, perdagangan dan lingkungan industri yang terbatas, hal ini sangat mempengaruhi laju pertumbuhan yang terjadi dalam tahun terakhir ini. Sektor Pertanian mengalami pertumbuhan yang negatif (-7,02 %), artinya pertumbuhan sektor ini mengalami pertumbuhan yang cenderung semakin menurun. Penurunan ini dengan sendirinya mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Jakarta Barat secara total. Namun demikian hal ini dapat dimaklumi karena banyak lahan produktif untuk pertanian berubah fungsi menjadi lahan non pertanian, seperti untuk pemukiman industri maupun pusat-pusat pengembangan kota lainnya. Dapat diperkirakan pada suatu saat sektor pertanian ini akan hilang dari indikator pertumbuhan ekonomi Jakarta Barat.

Sektor Listrik, Gas dan Air minum menunjukkan tingkat pertumbuhan yang paling tinggi dibandingkan dengan sektor lainnya yaitu sebesar 14,87 persen. Bila dibandingkan dengan pertumbuhan tingkat Propinsi DKI Jakarta yang sebesar 9,12 persen, angka ini jauh lebih besar, dengan data ini pula dapat dikatakan bahwa salah satu misi kota sebagai "Service City" telah dijalankan secara sungguh-sungguh sehingga dapat memenuhi kebutuhan pemakai data.

Kemudian untuk sektor Industri tingkat pertumbuhannya tidak lebih besar dari pertumbuhan DKI Jakarta, hal ini menunjukkan bahwa keberadaan sentra-sentra industri di wilayah lain sangat mempengaruhi pertumbuhan ini secara keseluruhan.

Demikian pula untuk Publik Service lainnya seperti perdagangan, bangunan masih tetap lebih tinggi dari pertumbuhan DKI Jakarta, hanya untuk sektor Keuangan dan Perbankan kelihatannya Jakarta Barat masih jauh tertinggal, yang hanya 4,46 persen yang jika dibandingkan dengan DKI Jakarta sebesar 11,24 persen. Satu hal yang menjadi kendala penyebab rendahnya pertumbuhan sektor ini adalah banyak berpindahnya Kantor-kantor pusat kegiatan sektor Keuangan dan Perbankan ke wilayah lain (Jakarta Pusat) disamping sistem kewilayahannya tidak mengacu pada administrasi kewilayahan pemerintah wilayah.

**Tabel B: LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI JAKARTA BARAT
MENURUT SEKTOR, TAHUN 1994**

No.	Sektor	LAJU PERTUMBUHAN (%)		
		HARGA BERLAKU	HARGA KONSTAN 1993	DKI JAKARTA
1.	PERTANIAN	6,05	- 7,02	- 5,93
2.	INDUSTRI	19,24	12,63	10,25
3.	LISTRIK, GAS & AIR MINUM	19,75	14,87	9,12
4.	BANGUNAN	20,00	7,03	5,93
5.	PERDAGANGAN, HOTEL & RESTORAN	16,53	7,58	7,35
6.	ANGKUTAN & KOMUNIKASI	8,60	4,92	5,56
7.	KEUANGAN, PERSEWAAN & JASA PERUSAHAAN	14,52	4,46	11,24
8.	JASA-JASA	13,32	3,63	3,74
PERTUMBUHAN		16,19	7,27	8,14

3.4. Kontribusi Sektoral Terhadap PDRB Jakarta Barat

Perkembangan sektoral atau kemampuan setiap sektor dalam meningkatkan PDRB tidak sama. Keadaan ini dipengaruhi banyak hal, terutama potensi dan kedua kemampuan untuk mengeksploitasi potensi yang ada sehingga memberikan

dukungan terhadap perkembangan dan pertumbuhan perekonomian secara keseluruhan.

Jakarta Barat merupakan wilayah yang berbatasan atau sangat dekat dengan laut, sehingga sumber air tanahnya sudah tidak dimanfaatkan lagi untuk kebutuhan rumahtangga, khususnya untuk kebutuhan air minum. Dampak dari kondisi wilayah yang demikian maka sektor pertanian, khususnya pertanian padi dan palawija semakin sulit untuk dapat dipertahankan/diusahakan lagi. Hal ini dapat dilihat dari pertumbuhan sektor ini dari tahun ke tahun semakin menurun kontribusinya terhadap pembentukan PDRB sehingga kemungkinan pada suatu saat sub sektor ini akan hilang peranannya. Untuk itu penurunan sektor pertanian harus diimbangi oleh pertumbuhan sektor lain sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan penduduknya.

Pada tahun 1994 terdapat 3 sektor utama yang memberikan kontribusi paling besar terhadap pembentukan PDRB Jakarta Barat, yaitu sektor Perdagangan, sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan serta sektor Industri Pengolahan. Ketiga sektor tersebut telah menyumbang 61,16 persen terhadap PDRB Jakarta Barat. Sektor Perdagangan menjadi penyumbang terbesar, yaitu 21,83 persen, atau lebih dari seperlima angka PDRB Jakarta Barat, disusul sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan 20,17 persen, dan sektor Industri 20,16 persen. Dominasi sektor-sektor yang disebutkan diatas mungkin akan berlangsung lama, ini dilihat dari perkembangannya dari tahun ke tahun angkanya menunjukkan yang paling besar.

TABEL C : KONTRIBUSI SEKTORAL TERHADAP PDRB JAKARTA BARAT DAN PROPINSI DKI JAKARTA, TAHUN 1994

No.	Sektor	HARGA BERLAKU		HARGA KONSTAN 1993	
		Berlaku	Konstan 1993	Berlaku	Konstan 1993
1.	PERTANIAN	0,17	0,16	0,17	0,15
2.	INDUSTRI	19,65	20,16	19,65	20,63
3.	LISTRIK, GAS & AIR MINUM	1,56	1,61	1,56	1,67
4.	BANGUNAN	16,64	17,18	16,64	16,60
5.	PERDAGANGAN, HOTEL & RESTORAN	21,76	21,83	21,76	21,83
6.	ANGKUTAN & KOMUNIKASI	9,29	8,68	9,29	9,09
7.	KEUANGAN, PERSEWAAN & JASA PERUSAHAAN	20,46	20,17	20,46	19,93
8.	JASA-JASA	10,46	10,21	10,46	10,00
PERTUMBUHAN		100,00	100,00	100,00	100,00

3.5. Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita

Berbagai ukuran dapat dipakai untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan seperti semakin meningkatnya pendapatan penduduk, berkembangnya kegiatan ekonomi, membaiknya tingkat kesejahteraan pekerja serta terbukanya kesempatan kerja untuk tenaga kerja baru yang mencari lapangan pekerjaan.

Penghitungan pendapatan per kapita merupakan salah satu indikator yang dapat dipakai dalam mengukur tingkat kemakmuran penduduk suatu daerah/wilayah. Penyajian yang dilakukan secara berkala baik dalam harga berlaku maupun dengan harga konstan akan menunjukkan gambaran umum mengenai peningkatan kemakmuran yang dicapai/diterima masyarakat.

Pada akhir Pelita V tahun 1993 jumlah penduduk Kotamadya Jakarta Barat tercatat 1,992 juta jiwa dengan PDRB atas dasar harga berlaku sebesar 9 770 173 juta rupiah, maka PDRB per kapita PDRB nya mencapai Rp. 4 904 607,-. Seiring dengan perjalanan waktu, angka per kapita ini semakin meningkat sehingga pada awal Pelita VI atau tahun 1994, jumlah ini naik menjadi Rp. 5 516 133,- untuk harga berlaku dan Rp. 5 092 734,- untuk harga konstan 1993.

TABEL D. PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO PER KAPITA JAKARTA BARAT DAN DKI JAKARTA TAHUN 1993-1994 (Rupiah)

INDIKATOR	TAHUN	
	1993	1994
HARGA BERLAKU:		
a. Jakarta Barat	4 904 607	5 516 133
b. DKI Jakarta	5 136 865	5 923 372
HARGA KONSTAN 1993		
a. Jakarta Barat	4 904 607	5 092 734
b. DKI Jakarta	5 136 865	5 470 577

3.6. Peranan PDRB Kotamadya Jakarta Barat terhadap Pembentukan PDRB DKI Jakarta.

Kemajuan dan pembangunan ekonomi DKI Jakarta tentunya tidak terlepas dari kemajuan yang dicapai pada masing-masing wilayah kota. Makin berkembangnya sektor ekonomi pada suatu wilayah akan memberikan peran yang lebih besar terhadap perkembangan sektor tersebut di DKI Jakarta dan lebih luas lagi dalam menciptakan PDRB nya.

Pelaksanaan penghitungan PDRB tahun 1994 memiliki momentum yang tepat dalam rangka mengevaluasi kembali tentang pencapaian kemajuan sektor ekonomi di DKI Jakarta, ini bertepatan pula dengan berakhirnya Pelita V dan memasuki tahap selanjutnya (Pelita VI).

Pada tahun 1993 peran kotamadya Jakarta Barat terhadap pembentukan PDRB DKI Jakarta sebesar 19,14 persen atau hampir seperlima dari PDRB DKI Jakarta. Potensi yang paling besar atau tertinggi adalah sektor bangunan yang nilainya hampir seperempat Produk DKI Jakarta (24,59 %), kemudian disusul sektor perdagangan, hotel dan restoran. Sektor lain yang cukup menonjol adalah sektor angkutan dan komunikasi kemudian baru sektor industri dan keuangan yang masing-masing berkisar 20 dan 17 persen. Sumbangan paling rendah diberikan oleh sektor pertanian, hal ini sejalan dengan perkembangan wilayah yang mengarah kepada public service dan bukan industri fasilitas.

Pada tahun berikutnya posisi ini tidak mengalami perubahan yang berarti baik pada harga berlaku maupun harga konstan. Kalau pada tahun 1993 urutannya adalah, sektor bangunan; perdagangan, hotel dan restoran; angkutan dan listrik, gas dan air minum, pada tahun 1994 urutannya tidak berubah, hanya saja dalam besarnya sumbangan terjadi sedikit pergeseran seperti terlihat pada Tabel E.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa selama dua tahun terakhir terjadi perubahan pola perekonomian yang mendorong terjadinya perubahan sumbangan PDRB Jakarta Barat terhadap PDRB DKI Jakarta. Rendahnya sumbangan/kontribusi ini bukan berarti sektor ini tidak berkembang tapi ada beberapa sektor yang mengalami peningkatan produksi yang cukup menggembirakan, disamping itu ada pula sektor yang berkembang tetapi tidak mengalami perkembangan yang berarti.

**TABEL E : PERANAN PDRB JAKARTA BARAT TERHADAP PDRB DKI
JAKARTA, TAHUN 1993 DAN 1994**

No.	Sektor	Harga Berlaku		Harga Konstan 1993	
		1993	1994	1993	1994
1.	PERTANIAN	10,90	11,59	10,90	11,43
2.	INDUSTRI	17,28	17,55	17,28	17,58
3.	LISTRIK, GAS & AIR MINUM	18,11	18,97	18,11	18,96
4.	BANGUNAN	24,59	24,67	24,59	24,65
5.	PERDAGANGAN, HOTEL & RESTORAN	18,79	18,72	18,79	18,83
6.	ANGKUTAN & KOMUNIKASI	20,16	20,16	20,16	20,04
7.	KEUANGAN, PERSEWAAN & JASA PERUSAHAAN	17,52	16,48	17,52	16,47
8.	JASA-JASA	20,02	20,10	20,02	20,02
PERTUMBUHAN		19,14	18,97	19,14	18,96

TABEL - TABEL LAMPIRAN

<https://jakbarkota.go.id>

TABEL 1. PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO ATAS DASAR
HARGA BERLAKU MENURUT LAPANGAN USAHA (JUTA RUPIAH)

No.	Lapangan Usaha	1993 *)	1994 *)	
(1)	(2)	(3)	(4)	
1.	PERTANIAN	16,603	17,607	9,6
	a. Tanaman Bahan Makanan	10,281	9,700	
	b. Tanaman Hias	5,296	6,753	
	c. Peternakan	447	507	
	d. Perikanan	578	647	
2.	INDUSTRI PENGOLAHAN	1,919,370	2,288,666	166,6
3.	LISTRIK, GAS DAN AIR BERSIH	152,823	183,000	8,5
	a. Listrik	102,991	112,694	
	b. Gas	33,097	45,865	
	c. Air Bersih	16,735	24,441	
4.	BANGUNAN	1,625,636	1,950,797	51,6
5.	PERDAGANGAN, RESTORAN DAN HOTEL	2,126,397	2,477,922	245,2
	a. Perdagangan	1,864,012	2,160,254	
	b. Restoran	231,077	275,450	
	c. Hotel	31,307	42,219	
6.	PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI	907,762	985,870	40,4
	a. Pengangkutan	570,864	612,185	
	1). Angkutan Rel	22,175	26,316	
	2). Angkutan Jalan Raya	409,960	430,063	
	3). Angkutan Udara	0	0	
	4). Angkutan Laut	0	0	
	5). Jasa Penunjang Angkutan	138,728	155,806	
	b. Komunikasi	336,898	373,685	
7.	KEUANGAN, PERSEWAAN & JASA PERUSAHAAN	1,999,220	2,289,426	23,8
	a. Bank	1,191,480	1,329,005	
	b. Lembaga Keuangan Tanpa Bank dan Jasa Penunjang Keuangan	207,964	248,692	
	c. Sewa Bangunan	441,591	515,306	
	d. Jasa Perusahaan	158,185	196,423	
8.	JASA - JASA	1,022,362	1,158,582	202,2
	a. Pemerintahan Umum	341,414	369,072	
	b. Swasta	680,948	790,511	
	1). Sosial dan Masyarakat	156,686	184,426	
	2). Hiburan dan Rekreasi	69,525	81,430	
	3). Perorangan dan Rumah tangga	454,737	524,655	
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		9,770,173	11,351,871	

*) Angka Sementara

jb

TABEL 2. PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO ATAS DASAR
HARGA KONSTAN 1993 MENURUT LAPANGAN USAHA (JUTA RUPIAH)

No.	Lapangan Usaha	1993 *)	1994 *)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	PERTANIAN	16,603	15,437
	a. Tanaman Bahan Makanan	10,281	8,501
	b. Tanaman Hias	5,296	5,903
	c. Peternakan	447	454
	d. Perikanan	578	579
2.	INDUSTRI PENGOLAHAN	1,919,370	2,161,770
3.	LISTRIK, GAS DAN AIR BERSIH	152,823	175,542
	a. Listrik	102,991	110,559
	b. Gas	33,097	45,805
	c. Air Bersih	16,735	19,178
4.	BANGUNAN	1,625,636	1,739,919
5.	PERDAGANGAN, RESTORAN DAN HOTEL	2,126,397	2,287,540
	a. Perdagangan	1,864,012	2,005,337
	b. Restoran	231,077	245,937
	c. Hotel	31,307	36,266
6.	PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI	907,762	952,469
	a. Pengangkutan	570,864	597,781
	1). Angkutan Rel	22,175	23,718
	2). Angkutan Jalan Raya	409,960	419,458
	3). Angkutan Udara	0	0
	4). Angkutan Laut	0	0
	5). Jasa Penunjang Angkutan	138,728	154,605
	b. Komunikasi	336,898	354,689
7.	KEUANGAN, PERSEWAAN & JASA PERUSAHAAN	1,999,220	2,088,345
	a. Bank	1,191,480	1,213,925
	b. Lembaga Keuangan Tanpa Bank dan Jasa Penunjang Keuangan	207,964	235,803
	c. Sewa Bangunan	441,591	459,611
	d. Jasa Perusahaan	158,185	179,007
8.	JASA - JASA	1,022,362	1,059,519
	a. Pemerintahan Umum	341,414	342,876
	b. Swasta	680,948	716,643
	1). Sosial dan Masyarakat	156,686	168,471
	2). Hiburan dan Rekreasi	69,525	74,772
	3). Perorangan dan Rumah tangga	454,737	473,399
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		9,770,173	10,480,542

*) Angka Sementara

jb

TABEL 3. DISTRIBUSI PERSENTASE PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
 ATAS DASAR HARGA BERLAKU MENURUT LAPANGAN USAHA

No.	Lapangan Usaha	1993 *)	1994 *)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	PERTANIAN	0.17	0.16
	a. Tanaman Bahan Makanan	0.11	0.09
	b. Tanaman Hias	0.05	0.06
	c. Peternakan	0.00	0.00
	d. Perikanan	0.01	0.01
2.	INDUSTRI PENGOLAHAN	19.65	20.16
3.	LISTRIK, GAS DAN AIR BERSIH	1.56	1.61
	a. Listrik	1.05	0.99
	b. G a s	0.34	0.40
	c. Air Bersih	0.17	0.22
4.	BANGUNAN	16.64	17.18
5.	PERDAGANGAN, RESTORAN DAN HOTEL	21.76	21.83
	a. Perdagangan	19.08	19.03
	b. Restoran	2.37	2.43
	c. H o t e l	0.32	0.37
6.	PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI	9.29	8.68
	a. Pengangkutan	5.84	5.39
	1). Angkutan Rel	0.23	0.23
	2). Angkutan Jalan Raya	4.20	3.79
	3). Angkutan Udara	0.00	0.00
	4). Angkutan Laut	0.00	0.00
	5). Jasa Penunjang Angkutan	1.42	1.37
	b. Komunikasi	3.45	3.29
7.	KEUANGAN, PERSEWAAN & JASA PERUSAHAAN	20.46	20.17
	a. Bank	12.20	11.71
	b. Lembaga Keuangan Tanpa Bank dan Jasa Penunjang Keuangan	2.13	2.19
	c. Sewa Bangunan	4.52	4.54
	d. Jasa Perusahaan	1.62	1.73
8.	JASA - JASA	10.46	10.21
	a. Pemerintahan Umum	3.49	3.24
	b. S w a s t a	6.97	6.96
	1). Sosial dan Kemasyarakatan	1.60	1.62
	2). Hiburan dan Rekreasi	0.71	0.72
	3). Perorangan dan Rumah tangga	4.65	4.62
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		100.00	100.00

*) Angka Sementara

jb

TABEL 4. DISTRIBUSI PERSENTASE PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
 ATAS DASAR HARGA KONSTAN 1993 MENURUT LAPANGAN USAHA

No.	Lapangan Usaha	1993 *)	1994 *)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	PERTANIAN		
	a. Tanaman Bahan Makanan	0.17	0.15
	b. Tanaman Hias	0.11	0.08
	c. Peternakan	0.05	0.06
	d. Perikanan	0.00	0.00
		0.01	0.01
2.	INDUSTRI PENGOLAHAN	19.65	20.63
3.	LISTRIK, GAS DAN AIR BERSIH		
	a. Listrik	1.56	1.67
	b. Gas	1.05	1.05
	c. Air Bersih	0.34	0.44
		0.17	0.18
4.	BANGUNAN	16.64	16.60
5.	PERDAGANGAN, RESTORAN DAN HOTEL		
	a. Perdagangan	21.76	21.83
	b. Restoran	19.08	19.13
	c. Hotel	2.37	2.35
		0.32	0.35
6.	PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI		
	a. Pengangkutan	9.29	9.09
	1). Angkutan Rel	5.84	5.70
	2). Angkutan Jalan Raya	0.23	0.23
	3). Angkutan Udara	4.20	4.00
	4). Angkutan Laut	0.00	0.00
	5). Jasa Penunjang Angkutan	0.00	0.00
	b. Komunikasi	1.42	1.48
		3.45	3.38
7.	KEUANGAN, PERSEWAAN & JASA PERUSAHAAN		
	a. Bank	20.46	19.93
	b. Lembaga Keuangan Tanpa Bank dan Jasa Penunjang Keuangan	12.20	11.58
	c. Sewa Bangunan	2.13	2.25
	d. Jasa Perusahaan	4.52	4.39
		1.62	1.71
8.	JASA - JASA		
	a. Pemerintahan Umum	10.46	10.11
	b. Swasta	3.49	3.27
	1). Sosial dan Masyarakat	6.97	6.84
	2). Hiburan dan Rekreasi	1.60	1.61
	3). Perorangan dan Rumah tangga	0.71	0.71
		4.65	4.52
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		100.00	100.00

*) Angka Sementara

jb

TABEL 5. INDEKS BERANTAI PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
 ATAS DASAR HARGA BERLAKU-MENURUT LAPANGAN USAHA

No.	Lapangan Usaha	1993 *)	1994 *)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	PERTANIAN	--	106.05
	a. Tanaman Bahan Makanan	--	94.35
	b. Tanaman Hias	--	127.50
	c. Peternakan	--	113.40
	d. Perikanan	--	111.90
2.	INDUSTRI PENGOLAHAN	--	119.24
3.	LISTRIK, GAS DAN AIR BERSIH	--	119.75
	a. Listrik	--	109.42
	b. Gas	--	138.57
	c. Air Bersih	--	146.05
4.	BANGUNAN	--	120.00
5.	PERDAGANGAN, RESTORAN DAN HOTEL	--	116.53
	a. Perdagangan	--	115.89
	b. Restoran	--	119.20
	c. Hotel	--	134.86
6.	PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI	--	108.60
	a. Pengangkutan	--	107.24
	1). Angkutan Rel	--	118.67
	2). Angkutan Jalan Raya	--	104.90
	3). Angkutan Udara	--	
	4). Angkutan Laut	--	
	5). Jasa Penunjang Angkutan	--	112.31
	b. Komunikasi	--	110.92
7.	KEUANGAN, PERSEWAAN & JASA PERUSAHAAN	--	114.52
	a. Bank	--	111.54
	b. Lembaga Keuangan Tanpa Bank dan Jasa Penunjang Keuangan	--	119.58
	c. Sewa Bangunan	--	116.69
	d. Jasa Perusahaan	--	124.17
8.	JASA - JASA	--	113.32
	a. Pemerintahan Umum	--	107.81
	b. Swasta	--	116.09
	1). Sosial dan Kemasyarakatan	--	117.70
	2). Hiburan dan Rekreasi	--	117.12
	3). Perorangan dan Rumah tangga	--	115.38
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		--	116.19

*) Angka Sementara

lb

TABEL 6. INDEKS BERANTAI PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
 ATAS DASAR HARGA KONSTAN 1993 MENURUT LAPANGAN USAHA

No.	Lapangan Usaha	1993 *)	1994 *)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	PERTANIAN	--	92.98
	a. Tanaman Bahan Makanan	--	82.69
	b. Tanaman Hias	--	111.46
	c. Peternakan	--	101.55
	d. Perikanan	--	100.01
2.	INDUSTRI PENGOLAHAN	--	112.63
3.	LISTRIK, GAS DAN AIR BERSIH	--	114.87
	a. Listrik	--	107.35
	b. Gas	--	138.39
	c. Air Bersih	--	114.60
4.	BANGUNAN	--	107.03
5.	PERDAGANGAN, RESTORAN DAN HOTEL	--	107.58
	a. Perdagangan	--	107.58
	b. Restoran	--	106.43
	c. Hotel	--	115.84
6.	PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI	--	104.92
	a. Pengangkutan	--	104.72
	1). Angkutan Rel	--	106.95
	2). Angkutan Jalan Raya	--	102.32
	3). Angkutan Udara	--	
	4). Angkutan Laut	--	
	5). Jasa Penunjang Angkutan	--	111.44
	b. Komunikasi	--	105.28
7.	KEUANGAN, PERSEWAAN & JASA PERUSAHAAN	--	104.46
	a. Bank	--	101.88
	b. Lembaga Keuangan Tanpa Bank dan Jasa Penunjang Keuangan	--	113.39
	c. Sewa Bangunan	--	104.08
	d. Jasa Perusahaan	--	113.16
8.	JASA - JASA	--	103.63
	a. Pemerintahan Umum	--	100.43
	b. Swasta	--	105.24
	1). Sosial dan Masyarakat	--	107.52
	2). Hiburan dan Rekreasi	--	107.55
	3). Perorangan dan Rumah tangga	--	104.10
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		--	107.27

*) Angka Sementara

jb

TABEL 7. INDEKS HARGA IMPLISIT PRODUK DOMESTIK REGIONAL
BRUTO MENURUT LAPANGAN USAHA

No.	Lapangan Usaha	1993 *)	1994 *)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	PERTANIAN	100.00	114.06
	a. Tanaman Bahan Makanan	100.00	114.11
	b. Tanaman Hias	100.00	114.39
	c. Peternakan	100.00	111.67
	d. Perikanan	100.00	111.89
2.	INDUSTRI PENGOLAHAN	100.00	105.87
3.	LISTRIK, GAS DAN AIR BERSIH	100.00	104.25
	a. Listrik	100.00	101.93
	b. Gas	100.00	100.13
	c. Air Bersih	100.00	127.44
4.	BANGUNAN	100.00	112.12
5.	PERDAGANGAN, RESTORAN DAN HOTEL	100.00	108.32
	a. Perdagangan	100.00	107.73
	b. Restoran	100.00	112.00
	c. Hotel	100.00	116.42
6.	PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI	100.00	103.51
	a. Pengangkutan	100.00	102.41
	1). Angkutan Rel	100.00	110.96
	2). Angkutan Jalan Raya	100.00	102.53
	3). Angkutan Udara		
	4). Angkutan Laut		
	5). Jasa Penunjang Angkutan	100.00	100.78
	b. Komunikasi	100.00	105.36
7.	KEUANGAN, PERSEWAAN & JASA PERUSAHAAN	100.00	109.63
	a. Bank	100.00	109.48
	b. Lembaga Keuangan Tanpa Bank dan Jasa Penunjang Keuangan	100.00	105.47
	c. Sewa Bangunan	100.00	112.12
	d. Jasa Perusahaan	100.00	109.73
8.	JASA - JASA	100.00	109.35
	a. Pemerintahan Umum	100.00	107.35
	b. Swasta	100.00	110.31
	1). Sosial dan Kemasyarakatan	100.00	109.47
	2). Hiburan dan Rekreasi	100.00	108.90
	3). Perorangan dan Rumah tangga	100.00	110.83
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		100.00	108.31

*) Angka Sementara

lb

**TABEL 8. PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO DAN ANGKA-ANGKA
PER KAPITA KOTAMADYA JAKARTA BARAT**

No.	Uraian	1993 *)	1994 *)
(1)	(2)	(3)	(4)
	ATAS DASAR HARGA BERLAKU		
1.	Produk Domestik Regional Bruto (Juta Rupiah)	9,770,173	11,351,871
2.	Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun (Ribu orang)	1,992.04	2,057.94
3.	Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita (Rupiah)	4,904,607	5,516,133
	ATAS DASAR HARGA KONSTAN 1993		
1.	Produk Domestik Regional Bruto (Juta Rupiah)	9,770,173	10,480,542
2.	Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun (Ribu orang)	1,992.04	2,057.94
3.	Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita (Rupiah)	4,904,607	5,092,734

*) Angka Sementara



<https://jakbarkota.bps.go.id>